

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, hasil dari pembangunan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan menyeluru. Krisis ekonomi yang saat ini melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat, krisis ini juga turut menghambat laju pembangunan nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat seluruhnya dan manusia seutuhnya. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masalah kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat dipecahkan. Menyadari hal pemerintah selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab harus berupaya untuk mencari jalan agar kesenjangan ini dapat diperkecil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil dari data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2006 lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2005 yang sebesar 35,1 juta jiwa atau sekitar 15,97 % dari seluruh penduduk Indonesia angka tersebut mengalami peningkatan 3,9 juta jiwa menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75 % dari jumlah penduduk di tahun 2006. Sedangkan angka pengangguran 10,9 juta jiwa 10,3 % dari jumlah angkatan kerja. Di samping angka kemiskinan yang disampaikan oleh BPS di lihat dari *Human Development Indeks* (HDI) atau *Indek Pembangunan Manusia* di Indonesia masih tertinggal, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain seperti Cina, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2006 yang menggunakan data tahun 2002, Indonesia hanya menempati urutan ke-108 dari 177 negara, hal ini berimplikasi pada produktivitas manusia yang rendah.

Permasalahan utama dalam hal pemberantasan kemiskinan adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih dalam kondisi tidak dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan (*proverty*) dan keterbelakangan pendidikan (*ignorance*) agar dapat menjadi masyarakat yang berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasif dan demokratis, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Perkembangan ekonomi di Indonesia akan lebih berkembang jika lebih memberdayakan dalam bidang kewirausahaan. Oleh sebab itu kewirausahaan merupakan salah satu unsur yang penting untuk menyukseskan pembangunan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Prawirokusumo, (2010:12) bahwa “kewirausahaan telah mengubah perekonomian dunia, karena kewirausahaan selalu diasosiasikan dengan kelahiran bisnis baru yang selalu memberi vitalitas bagi ekonomi”.

Di Indonesia sendiri problem yang dihadapi masyarakat yang berkeinginan untuk berwirausaha adalah dalam hal modal, karena tidak bisa dipungkiri modal adalah pondasi awal dalam membangun sebuah usaha. Dalam mengatasi permasalahan modal, tidak jarang beberapa lembaga keuangan seperti Bank dan lembaga-lembaga kredit menawarkan pinjaman uang sebagai modal usaha. Namun prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang rumit, jaminan kekayaan yang harus tersedia untuk mendapatkan kredit, serta lokasi lembaga kredit yang jauh dari tempat tinggal menjadi pembatas bagi masyarakat terutama yang ada di daerah pedesaan untuk memanfaatkan lembaga tersebut dalam mengatasi masalah permodalan mereka.

Mengatasi pentingnya bantuan permodalan bagi masyarakat pedesaan yang berkeinginan untuk berwirausaha dan belum berhasilnya kebanyakan lembaga kredit yang ada dalam mengatasi masalah permodalan, maka perlu adanya campur tangan dari pemerintah yang diharapkan mampu lebih meringankan dan memihak kepada kelompok miskin dipedesaan, yang benar-benar membutuhkan tambahan permodalan.

Berkenaan dengan persoalan-persoalan diatas maka perlu adanya upaya pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan sektor wirausaha masyarakat. Maka dari itu pemerintah

mencanakan beberapa program dalam upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM-MP atau Runal PNPM) yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

Sasaran yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang strata sosialnya rendah seperti yang dikatakan oleh Onny S. Prijono & A. M. W. Pranaka (1996:23), bahwa “rakyat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, nelayan, petani, orang miskin di Desa dan di Kota, kondisi masyarakat yang belum mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya”. Sedangkan menurut Kartono, (2004:33)

Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah masyarakat lapisan bawah, pinggiran, dan pedesaan, Karena masyarakat tersebut masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, keterampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan transformasi, rendahnya mutu dan tarap hidup.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra mengemukakan “salah satu cara untuk mengatasi atau memberantas kemiskinan adalah melalui PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)”.

Sesuai dengan visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengolah sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) pada hakekatnya merupakan Program pemerintah yang dijalankan dan diawasi oleh masyarakat dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, kemandirian di tingkat kesejahteraan masyarakat.

Khaidar Syaefulhamdi Ependi, 2014

Kontribusi Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Minat Wirausaha Masyarakat

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di dalam UU. No 20 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2004 dalam program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan nasional dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Pedesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang dicanankan oleh pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi diresmikan Presiden RI pada 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) adalah program pemberdayaan terbesar di Indonesia. Pada pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang dirasa perlu untuk diberdayakan, dalam hal ini terutama masyarakat miskin yang berada di daerah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan serta dana Bantuan Langsung Untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN), alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberian bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang digunakan PNPM Mandiri Pedesaan dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk

masyarakat dengan didukung dan pengawasan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) adalah bantuan peminjaman modal bagi masyarakat yaitu bagi kelompok usaha ekonomi produktif melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha ataupun bagi masyarakat yang berkeinginan untuk berwirausaha untuk meningkatkan keterampilan usahanya. Pada pelaksanaannya masyarakat terlebih dahulu dibagi dalam kelompok, setiap masyarakat yang memiliki usaha yang akan membuat usaha masuk dalam kelompok tersebut yang terdiri dari tujuh orang, yang selanjutnya akan diseleksi untuk mendapatkan modal usaha.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kontribusi dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Maka kemudian peneliti menentukan judul penelitian “**Kontribusi Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Minat Wirausaha Masyarakat (Studi Deskriptif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi)**”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi penulis di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.
2. Masih kurangnya minat berwirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi untuk berwirausaha.

3. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan yang memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan wirausaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
4. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan di Desa Jampang Tengah.

Berdasarkan di atas maka secara lebih spesifik permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada kontribusi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana gambaran minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi setelah mendapatkan bantuan dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan kajian secara ilmiah mengenai Kontribusi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.

2. Untuk mengetahui gambaran minat wirausaha masyarakat di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi setelah mendapatkan bantuan dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan konsep-konsep baru dalam menunjang ilmu pengetahuan dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengalaman praktis penulis dalam penggunaan konsep-konsep dan teori-teori yang telah di pelajari penulis.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan dalam kaitan upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

E. Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

BAB I : Berisi tentang Pendahuluan, yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penulisan Skripsi.

BAB II : Berupa Landasan Teoritis, yang didalamnya berisi tentang teori dan konsep mengenai PNPM Mandiri Pedesaan, Konsep Pemberdayaan, Konsep Minat, Konsep Wirausaha, dan Konsep Minat Wirausaha.

BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian, yang didalamnya menguraikan Lokasi dan Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Prosedur Pengolahan Data.

BAB IV : Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, Deskripsi Data, dan sebagainya.

BAB V : Berisi tentang Simpulan dan Saran.

